

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

### **Perkembangan Indeks Perkembangan Harga/IPH (Non-IHK)**

Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga di triwulan ke-2 tahun 2025 terlihat bahwa terdapat satu bulan periode peningkatan IPH dan dua bulan periode penurunan IPH, yang secara jumlah maka dapat terlihat hingga triwulan ke-2 tahun 2025, harga komoditas IPH meningkat sebesar 0,08% dibandingkan akhir tahun 2024. Di Triwulan ke-2 Tahun 2025, peningkatan dan penurunan IPH didominasi oleh komoditas Daging Ayam Ras, dimana peningkatan dan penurunannya menjadi komoditas andil peningkatan IPH tertinggi. Selain itu komoditas Cabai Rawit juga menjadi komoditas andil tertinggi pada periode bulan Mei dimana penurunannya memiliki andil sebesar -1,24% dari penurunan IPH total sebesar 2,71%. Selain dua komoditas tersebut, terdapat komoditas andil peningkatan/ penurunan IPH tertinggi yaitu Telur Ayam Ras, Cabai Merah, dan Bawang merah. Ada dua hal utama yang menjadi perhatian atas anjloknya harga daging ayam ras, pertama pemberian layanan administratif dalam bentuk kuota impor ayam GPS (*Grand Parent Stock*) dimana hal tersebut turut menambah pasokan ayam di dalam negeri selain itu yang kedua yaitu lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian produksi oleh pemerintah.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

### 1. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah

Selama Triwulan II Tahun 2025 (April-Juni), pengendalian inflasi di Kabupaten Garut menghadapi berbagai tantangan, baik struktural maupun situasional. Meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sejumlah permasalahan masih menghambat efektivitas pengendalian inflasi secara optimal. Permasalahan ini menjadi penting untuk diidentifikasi guna mendukung perumusan strategi pengendalian inflasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

#### 1. Tekanan Inflasi Musiman Akibat Momentum Hari Besar Keagamaan

Pada periode Triwulan II, terutama menjelang dan pasca Hari Raya Idulfitri, terjadi lonjakan permintaan terhadap komoditas bahan pokok. Hal ini menyebabkan kenaikan harga yang cukup signifikan, khususnya pada komoditas strategis seperti cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam. Ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan pasokan menjadi pemicu utama lonjakan harga. Salah satu contoh yang menonjol adalah kenaikan harga cabai rawit merah yang mencapai Rp90.000/kg pada awal April 2025, yang menunjukkan tekanan inflasi yang cukup tinggi di pasar lokal.

#### 2. Keterbatasan Alokasi Anggaran Daerah

Pengendalian inflasi yang memerlukan intervensi cepat, seperti operasi pasar murah atau subsidi harga, membutuhkan ketersediaan dana yang cukup. Meskipun Kabupaten Garut telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kegiatan TPID, keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah secara merata. Beberapa program hanya dapat dilaksanakan secara reaktif, terutama dalam merespons lonjakan harga

musiman, tanpa perencanaan jangka menengah yang konsisten.

**3. Permasalahan Distribusi dan Ketersediaan Pasokan**

Permasalahan lain yang turut berkontribusi terhadap inflasi adalah keterbatasan distribusi dan pasokan komoditas. Ketergantungan Kabupaten Garut terhadap pasokan dari luar daerah, seperti untuk daging ayam dan telur, menyebabkan kerentanan terhadap gangguan logistik dan cuaca. Distribusi ke wilayah-wilayah kecamatan yang terpencil juga masih menghadapi hambatan infrastruktur, yang berdampak pada fluktuasi harga di tingkat pengecer.

**4. Kurangnya Sinergi Antar Pemangku Kepentingan**

Sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, pelaku usaha lokal, dan masyarakat belum sepenuhnya terbangun secara sistemik. Walaupun telah dilakukan High Level Meeting TPID, keterlibatan multipihak masih bersifat sektoral dan belum menyatu dalam suatu sistem kolaboratif yang kuat. Hal ini berdampak pada lemahnya respons kolektif terhadap gejolak harga di pasar.

Komoditas	Harga Tertinggi (Rp/kg)	Periode	Penyebab Utama
Cabai rawit merah/inul	Rp90.000	April-Mei 2025	Cuaca buruk, gagal panen, permintaan tinggi
Bawang merah	>Rp90.000	April 2025	Permintaan lebaran, pasokan menurun
Daging ayam broiler	Rp35.000–37.000	April 2025	Pasokan belum stabil pasca-libur panjang
Telur ayam ras	Rp33.000	Mei 2025	Lonjakan permintaan, distribusi terbatas
Cabai merah keriting	Rp45.000	April 2025	Produksi terbatas, cuaca ekstrem
Jagung manis	Rp14.000	Maret-April 2025	Permintaan lokal naik, keterbatasan panen

**5. Fluktuasi Harga Komoditas Strategis**

Beberapa komoditas pangan strategis mengalami kenaikan harga signifikan selama Triwulan II 2025. Berdasarkan pantauan harga dari pasar-pasar utama di Garut dan sumber nasional, komoditas yang mengalami lonjakan harga antara lain:

Fluktuasi harga tersebut berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Kenaikan harga cabai rawit dan bawang merah menjadi salah satu faktor utama penyumbang inflasi daerah pada periode ini.

**6. Masih Terbatasnya Skala Produksi Pangan Mandiri Masyarakat**

Pemerintah Kabupaten Garut telah mendorong berbagai program ketahanan pangan lokal seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Gerakan Tanam Panen Cepat (Harum Madu).

Namun, cakupan pelaksanaan program ini masih terbatas pada sebagian kecamatan dan belum menyasar secara menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat. Padahal, inisiatif ini berpotensi besar dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan di tingkat lokal.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil identifikasi di atas, pengendalian inflasi di Kabupaten Garut selama Triwulan II Tahun 2025 menghadapi tantangan multidimensi, baik dari sisi tekanan musiman, keterbatasan fiskal, infrastruktur distribusi, hingga volatilitas harga komoditas strategis. Meskipun telah dilakukan berbagai intervensi seperti operasi pasar murah dan koordinasi TPID, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan berbasis data digital.

### **3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.**

#### **1. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah**

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah merupakan bagian integral dari upaya menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta menjamin daya beli masyarakat. Di tingkat daerah, kebijakan ini diarahkan pada implementasi strategi-strategi konkret yang bersifat responsif, kolaboratif, dan adaptif terhadap dinamika pasar serta kondisi sosial ekonomi setempat.

Pemerintah Kabupaten Garut, melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), telah mengembangkan berbagai instrumen dan program untuk mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas pangan strategis yang menjadi kontributor utama tekanan inflasi di tingkat lokal. TPID bertindak sebagai koordinator lintas sektor yang menghimpun data, merumuskan kebijakan, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian harga di pasar rakyat maupun sentra distribusi.

Dalam rangka menjaga laju inflasi agar selalu stabil sesuai dengan *range* yang telah ditetapkan serta untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi barang, menjaga daya beli Masyarakat dan mengurangi disparitas harga antar kecamatan/wilayah, TPID Kabupaten Garut telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

##### **1. Keterjangkauan Harga**

Pemerintah daerah melakukan intervensi harga melalui kegiatan operasi pasar murah, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan saat terjadi lonjakan harga tertentu. Selain itu, subsidi ongkos angkut dan penyediaan komoditas melalui kerja sama antardaerah juga menjadi salah satu bentuk pengendalian harga secara langsung.

- Monitoring harga komoditas strategis di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Garut ;

Kegiatan monitoring harga komoditas strategis di pasar tradisional di hadiri oleh Ibu Wakil Bupati Garut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama dilaksanakan pada Bulan Mei di Pasar Wanaraja, dan kedua menjelang HBKN (Idul Adha) pada Hari Rabu tanggal 4 Juni

2025 di Pasar Leles.

- Pemantauan Harga pada Triwulan II yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan antara lain :

Pada Bulan April ke Pasar Samarang, Cikajang, Bayongbong, Malangbong dan Limbangan

Bulan Mei ke Pasar Wanaraja, Bayongbong, Cikajang, Limbangan dan Malangbong

Bulan Juni ke Pasar Wanaraja, Leles, Cikajang, Limbangan dan Malangbong

Pengumpulan dan penyediaan informasi harga pangan komoditas peternakan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga serta keterjangkauan akses pangan komoditas peternakan pada 11 pasar tradisional dan toko modern.

Sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga pangan komoditas peternakan, kami telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan penyediaan informasi harga pangan komoditas peternakan, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan, stabilitas stok, dan keterjangkauan harga pada tingkat konsumen. Pemantauan dilakukan pada beberapa pasar tradisional dan toko modern dengan komoditas yang di pantau adalah daging ayam, daging sapi dan telur ayam.

#### 1. Ketersediaan Pasokan

Pemkab Garut menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditas, seperti Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, untuk menjaga pasokan barang, khususnya daging ayam, telur, dan cabai. Selain itu, program seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Gerakan Tanam Panen Cepat (Harum Madu) turut digalakkan guna memperkuat produksi pangan lokal.

25. Selama kurun waktu Triwulan 2, beras CPPD telah disalurkan sebanyak 25.294,50 kg untuk 4.075 KK / 4.755 jiwa dengan sasaran masyarakat yang terdampak bencana kebakaran rumah, rumah roboh, tanah longsor dan rawan pangan kronis (miskin).
26. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebanyak 6 kali yaitu pada tanggal 17 April 2025 di Desa Pangeureunan Kecamatan Limbangan, tanggal 24 April 2025 di Alun-alun Kecamatan Pameungpeuk, tanggal 6 Mei 2025 di kantor Kecamatan Cibalong, tanggal 14 Mei 2025 di kantor Kecamatan Mekarmukti, dan tanggal 26 Juni 2025 di kantor Kecamatan Karangtengah. Adapun komoditas pangan yang diperjualbelikan antara lain beras, minyak goreng, telur ayam ras, terigu, gula pasir, daging ayam, dan aneka sayuran. Setiap lokasi GPM Pangling dialokasi sebanyak 3 ton dan mendapatkan subsidi Rp. 2.000/kg/liter, sehingga masyarakat bisa memperoleh komoditas pangan dengan harga di bawah harga pasar.
  1. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah sebanyak 6 kali dengan komoditas beras, minyak goreng, terigu dan gula pasir.
  2. Warung Pangan Inflasi

Akses terhadap pangan atau keterjangkauan pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan.

Di Kabupaten Garut, akses terhadap pangan atau keterjangkauan pangan menjadi salah satu kendala yang dihadapi masyarakat terutama untuk masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang jauh dari akses perkotaan dan pasar. Masih banyak rumah tangga di Kabupaten Garut, terutama di desa-desa terpencil yang menjadi kantong kemiskinan, yang masih sulit menjangkau atau mengakses pangan. Jarak yang berjauhan dan sarana transportasi yang masih terbatas menyebabkan distribusi pangan menemui banyak kendala sehingga harga pangan di desa-desa terpencil yang jauh dari pasar menjadi mahal dan sulit diakses.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu terobosan atau inovasi dalam rangka menyelesaikan kendala jarak dan waktu dalam pendistribusian pangan pada masyarakat. Salah satunya adalah melalui pembentukan Warung Pangan Inflasi. Dengan dibentuknya Warung Pangan Inflasi di desa-desa terpencil, maka keterjangkauan masyarakat dalam mengakses pangan yang murah dan berkualitas bisa dipenuhi.

Pembentukan Warung Pangan Inflasi pada tahun anggaran 2025 dialokasikan 3 unit, dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima Manfaat	Alamat	Beras	Gula Pasir	Minyak Goreng	Telur
			(Kg)	(Kg)	(Liter)	(Kg)
1	Kelompok Tani Anugrah Tani	Kp. Ciliud RT 07 RW 01, Desa Sagara Kecamatan Cibalong	1.000	100	100	100
2	Kelompok Tani Putra Saluyu	Kp. Ciderema RT 02 RW 01, Desa Selaawi Kecamatan Talegong	1.000	100	100	100
3	Kelompok Tani Sinar Harapan	Kp. Cicayur Lebak RT 01 RW 01, Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug	1.000	100	100	100
Jumlah			3.000	300	300	300

1. Monitoring Kegiatan HARUM MADU dilaksanakan pada Kelompok Tani (KT)/Kelompok Wanita Tani (KWT) sebanyak 2 kali di 16 KWT /KT.
2. Optimalisasi penanaman cabai pada kegiatan HARUM MADU baik di demplot atau pekarangan rumah masyarakat melalui polibag pada Kelompok Tani (KT)/Kelompok Wanita Tani(KWT) sebagai berikut:
3. KWT Kenangan Desa Regol Kecamatan Garut Kota
4. KT Motekar II Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul
5. KWT Anggrek DEsa Sukamulya Kecamatan Pangatikan
6. KWT Annisa Desa Sindanggalih Kecamatan Karang Tengah
7. KT Bakti Saluyu Desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong
8. KWT Bionic Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah
9. KWT Mulyasari Desa Putrajawa kecamatan Selaawi
10. KWT Sejahtera Desa Ciwabgi Limbangan
11. KWT Manjur Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi
12. KWT Harapan Mukti Desa Sindangsuka Kecamatan Cibat
13. KT Jatu Hueip Desa Cikembulan Kecamatan Kadungora
14. KWT Wargi Binangkit Desa Margaluyu Kecamatan Leles
15. KWT Karya Usaha Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug
16. KWT Salsabila Desa Hegarmanah Kecamatan Bayongbong
17. KWT Karya Jelita Desa Caringin Kecamatan Caringin
18. KWT Palawah Butun Desa Cigadog Kecamatan Cikelet

Optimalisasi penanaman bawang merah seluas 1 ha di Desa Sukahurip Kecamatan

19.

Pangatikan dan Penanaman aneka cabai seluas 3 - 4 Ha di Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler , telur ayam pada kegiatan TERAS PANGAN.

20. Penyebaran bibit sapi potong kepada masyarakat/kelompok tani

Sektor peternakan khususnya komoditas daging sapi, merupakan salah satu komponen utama penyumbang inflasi terutama pada saat permintaan meningkat seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Ketersediaan pasokan lokal yang belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat menyebabkan ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dan mendorong naiknya harga. Sebagai bagian dari strategi jangka menengah pengendalian inflasi daerah, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut melalui sinergi lintas sektor menyalurkan bantuan bibit sapi potong kepada masyarakat atau peternak. Kegiatan ini bertujuan memperkuat produksi daging lokal, menjaga kesinambungan pasokan, dan menekan gejolak harga.

1. Penyebaran bantuan pakan ternak kepada masyarakat/peternak ayam petelur

Ayam petelur merupakan komoditas unggas strategis yang berkontribusi besar terhadap pasokan protein hewani, terutama melalui produksi telur ayam ras. Kenaikan harga pakan dalam beberapa waktu terakhir telah menekan margin keuntungan peternak, mengganggu stabilitas produksi, dan mendorong kenaikan harga telur di pasar konsumen. Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Perikanan dan Peternakan menyalurkan bantuan pakan ternak kepada kelompok peternak ayam petelur guna menekan biaya produksi, menjaga kestabilan pasokan telur, dan mencegah lonjakan inflasi pangan. Pakan ayam petelur yang didistribusikan sejumlah 6.400 kg untuk 1 kelompok tani.

1. Rehabilitasi Rumah Potong Hewan

Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan salah satu infrastruktur strategis dalam mendukung rantai pasok pangan, khususnya komoditas peternakan seperti daging sapi. Dalam upaya meningkatkan efisiensi distribusi, menjamin keamanan pangan, serta menjaga stabilitas pasokan daging di wilayah Kabupaten Garut, kami melakukan rehabilitasi terhadap unit RPH Ciawitali. Langkah ini bertujuan mendukung pengendalian inflasi daerah, mengingat daging merupakan komoditas berkontribusi tinggi terhadap laju inflasi, terutama pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Rehabilitasi di fokuskan pada RPH Ciawitali dimana RPH tersebut memiliki kontribusi besar terhadap distribusi daging di wilayah-wilayah pasar tradisional.

1. Kelancaran Distribusi

Perbaikan jalur distribusi barang dan logistik menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi. Keterlibatan koperasi, BUMDes, dan pelaku transportasi lokal difasilitasi untuk mendukung kelancaran suplai komoditas ke pasar-pasar tradisional.

1. Kerja sama antar daerah (KAD) untuk komoditas pangan strategis

Komoditas pangan strategis komoditas peternakan seperti daging ayam ras, telur ayam



ras, dan daging sapi merupakan penyumbang utama inflasi daerah, khususnya saat terjadi gangguan pasokan atau lonjakan permintaan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, kami mendorong implementasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sebagai upaya menjamin kelancaran distribusi pasokan, stabilisasi harga, dan peningkatan ketahanan pangan. Kerja sama ini merupakan instrumen strategis pengendalian inflasi berbasis sinergi horizontal antara pemerintah daerah penghasil dan daerah konsumen, sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat dan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah.

#### 1. Komunikasi yang Efektif

Pemerintah daerah mengoptimalkan diseminasi informasi harga dan ketersediaan stok melalui media sosial, situs resmi pemerintah, dan papan informasi di pasar. Kampanye edukatif tentang belanja bijak, pemanfaatan pekarangan, dan kewaspadaan terhadap hoaks harga juga dilakukan untuk membangun literasi masyarakat.

1. Rapat koordinasi Dwimingguan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Pemantauan harga komoditas pangan strategis pada aplikasi SIMPANGAN secara *real time*;
3. Melakukan Pengujian pangan.

Pelaksanaan pengujian pangan dengan rapid test kit sebanyak 77 kali pengujian 6 lokasi yaitu Pasar Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening 29 April 2025, Pasar Cibatuh Kecamatan Cibatuh 25 April 2025, Pasar Wisata Samarang 20 Mei 2025, Pasar Rakyat Leles Kecamatan Leles 22 Mei 2025, Pasar Rakyat Leles Kecamatan Leles 3 Juni 2025, Pasar Guntur Ciawitali 25 Juni 2025.

2. Sosialisasi pembuatan pakan mandiri (*self mixing*) berbasis jagung lokal pada komoditas ayam petelur
- 3.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

##### 1. Evaluasi kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah merupakan proses penting dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan mampu menahan laju inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Di Kabupaten Garut, evaluasi kebijakan dilakukan secara berkala oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui mekanisme pemantauan data harga, distribusi logistik, capaian program intervensi, serta masukan dari pemangku kepentingan di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa capaian, dan hambatan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. **Capaian Positif**
2. Stabilisasi Harga Beberapa Komoditas Strategis

Kegiatan seperti operasi pasar murah, kerja sama antar daerah (KAD), dan fasilitasi distribusi telah berhasil menahan lonjakan harga beras, minyak goreng, dan gula pasir pada sebagian besar wilayah Garut.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat

1.

Kampanye komunikasi publik mengenai pemanfaatan pekarangan, belanja bijak, dan konsumsi lokal telah mulai menunjukkan dampak positif, terutama di wilayah kecamatan dengan intervensi aktif dari penyuluh pertanian dan kader pangan.

#### 1. Penguatan Koordinasi TPID

Koordinasi antar perangkat daerah serta dukungan dari Bank Indonesia dalam high level meeting (HLM) dan *capacity building* mendorong keselarasan strategi dan perencanaan program.

#### 1. Permasalahan dan Tantangan

##### 2. Lonjakan Harga Komoditas Volatil

Meskipun beberapa komoditas dapat dikendalikan, pada Triwulan II 2025 terdapat lonjakan signifikan pada komoditas bawang merah, cabai merah, dan daging ayam ras, terutama akibat musim kemarau yang memengaruhi produksi dan distribusi.

#### 1. Keterbatasan Pasokan dan Ketergantungan Antar Daerah

Produksi lokal yang masih rendah menyebabkan ketergantungan pada pasokan luar daerah, yang memicu keterlambatan distribusi dan volatilitas harga saat terjadi gangguan logistik.

#### 1. Distribusi Program yang Belum Merata

Intervensi kebijakan seperti pasar murah dan pengendalian pasokan belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan, terutama di daerah pinggiran dan desa-desa dengan akses terbatas.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Kab. Garut secara umum berdampak dalam menekan harga komoditas pokok inflasi, sehingga inflasi dapat tetap terjaga stabil. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi kedepannya, seperti:

1. Sektor produksi pangan strategis, khususnya komoditas beras, jagung, bawang merah dan cabai merah masih sangat rentan terhadap perubahan cuaca, sementara komoditas peternakan masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan ketersediaan pakan;
2. Penguatan dan *up to date* harga harian dari pasar serta akses masyarakat terhadap ketersediaan data komoditas pangan strategis perlu ditingkatkan;
3. Pengelolaan stok pangan strategis setelah produksi dan panen masih harus dioptimalkan, agar tidak terjadi kekurangan/kelangkaan pada saat terjadi gangguan cuaca atau tidak sedang masa panen;
4. Masih ketergantungan terhadap komoditas impor seperti bawang putih dan kedelai;
5. Lebih ditingkatkan untuk kegiatan monitoring harga di pasar dan kegiatan lain yang mendukung pengendalian inflasi di daerah;
6. Monitoring ketersediaan ternak hidup di pasar hewan dilakukan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan ternak hidup akan tetapi pencatatan dan pelaporan masih dilakukan secara manual sehingga memperlambat respon kebijakan

Peningkatan pada aspek tindak lanjut terhadap temuan di lapangan, termasuk peran

7. pengawasan dan penertiban pedagang spekulatif
  8. Masih terdapat kesenjangan antara laporan distributor dan kondisi di lapangan, sehingga verifikasi lapangan perlu di perkuat
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

### **1. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah**

Langkah Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah melalui TPID Kabupaten Garut dalam pengendalian inflasi Triwulan 2-2025 diantaranya:

1. Stabilitas harga komoditas pangan strategis melalui kegiatan monitoring pemantauan harga di beberapa pasar serta penguatan distribusi pangan, sebagai berikut:
2. Pemantauan dan pelaporan harga komoditas pangan strategis secara real time melalui aplikasi SIMPANGAN yang telah terintegrasi dengan SILINDA JABAR, serta melakukan sidak pasar ke beberapa pasar tradisional saat harga-harga sedang mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati
3. Melakukan sidak pada distributor khususnya untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga dan berada diatas HET.
4. Melakukan intervensi harga melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Murah (OPM) di beberapa Kecamatan yang digabungkan dengan Pelayanan Publik untuk Masyarakat di beberapa Kecamatan.
5. Melakukan Gerakan menanam cepat panen untuk komoditas padi dan jagung untukantisipasi lonjakan harga pada saat HBKN dan kondisi tertentu seperti kekeringan/curah hujan yang tinggi.
6. Menggerakkan Gerakan Halaman Rumah Masyarakat Terpadu (Harum Madu) untuk komoditas cabai sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Garut.
7. Mengintensifkan kerja sama dengan Bulog dan petani lokal untuk menyerap hasil panen, seperti gabah, guna meningkatkan cadangan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga.
8. Tidak bergantung pada satu wilayah produsen saja.
9. Meningkatkan koordinasi antara Dinas terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan, untuk memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan efisien.
10. Kolaborasi dengan kelompok tani dan penyuluh untuk stabilisasi pasokan lokal.
11. Fokuskan GPM di kecamatan dengan harga tertinggi atau akses pasar yang sulit.
12. Menjalin kerja sama dengan daerah lain untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap stabil, terutama untuk komoditas yang tidak diproduksi secara lokal
13. Mendorong setiap desa untuk memiliki lumbung pangan yang dapat digunakan sebagai cadangan saat terjadi lonjakan harga atau kekurangan pasokan
14. Skalkan sosialisasi dan pelatihan pembuatan pakan mandiri (*self mixing*) ke lebih banyak kelompok peternak, khususnya di daerah sentra jagung sehingga para peternak tidak bergantung pada bahan pakan import
15. Revitalisasi pasar hewan dan pasar tradisional agar lebih siap menghadapi lonjakan permintaan saat hari besar keagamaan atau liburan
16. Penguatan cadangan pangan daerah yang siap digunakan untuk operasi pasar apabila terjadi gejolak harga
17. Edukasi tata kelola usaha peternakan modern melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan

Mendorong hilirisasi produk peternakan, seperti olahan telur dan daging dalam bentuk

18. siap saji, agar peternak tidak tergantung pada pasar mentah
19. Rutin melakukan forum koordinasi lintas OPD, sektor swasta, dan akademisi, terutama menjelang momen rawan inflasi
20. Menjalin komunikasi dengan pelaku usaha peternakan dan distributor pangan untuk mitigasi risiko kelangkaan
21. Pengembangan sentra peternakan rakyat untuk meningkatkan pasokan dari hulu
22. Kerjasama dengan peternak lokal dan koperasi diperkuat guna menjamin ketersediaan hewan potong secara berkelanjutan
23. Sosialisasi dan pembinaan ke pedagang dan pelaku usaha daging untuk memperluas penggunaan RPH resmi.
24. Sosialisasi teknis pemberian pakan dan pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan alternatif
25. Penguatan sistem integrasi sapi dan pertanian (*crop-livestock integration*)
26. Peningkatan dukungan pembiayaan melalui KUR Peternakan bagi penerima bibit
27. Pengembangan rumah potong hewan (RPH) skala kecamatan untuk mendekatkan rantai distribusi